

## RESTRUKTURISASI PERBANKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMULIHAN KEGIATAN EKONOMI DAN PENGENDALIAN MONETER

Ilham Ikhsan \*)

*M*engomentari usulan Sdr. Halim Alamsyah agar dalam upaya restrukturisasi perbankan ini perlu disusun *grand strategy* yang dilakukan oleh *lead agency*, adalah merupakan usulan yang cukup realistis, karena selain untuk memberikan arah yang lebih jelas, juga mengingat adanya dua hal yang mendasar yang perlu dikoordinasikan penyelesaiannya, yaitu :

1. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam restrukturisasi ataupun rekapitalisasi perbankan.
2. Semester I tahun 1999, diperkirakan dunia perbankan Indonesia akan menghadapi puncak kesibukan dalam melaksanakan perhelatan besar, mengingat banyaknya agenda yang harus dikerjakan pada masa-masa tersebut.
3. Perlunya komunikasikan kepada masyarakat yang harus dilakukan secara sistimatis dan hati-hati, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap masih dirasakan labil.

Masalah restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan yang perlu mendapat perhatian antara lain :

√ Sebagian besar bank yang ada dalam kondisi *under capitalize* sedangkan dilain pihak ketentuan mengenai BMPK harus selalu dipatuhi sebagai upaya mengimplementasikan *Prudent Banking Practices*, sehingga kemampuan sektor perbankan dalam menyalurkan kredit akan terbatas. Padahal ekspansi kredit banyak diharapkan dapat menjadi lokomotif dalam menggerakkan mesin ekonomi (sektor riil) yang saat ini dalam keadaan terpuruk.

√ Pada dasarnya bank dengan katagori B merupakan *insolvent banks* yang memerlukan dana segar (bukan paper), paling tidak untuk memperbaiki cash flow mereka akibat dari *negatif spread*, tingginya NPL ataupun gejolak kurs. Bilamana kondisi cash flow mereka masih tidak dapat diatasi maka dikhawatirkan upaya rekapitalisasi tersebut akan gagal dan berakhir pada BBO. Apabila hal ini terjadi maka biaya maupun upaya yang telah dilakukan akan sia-sia, padahal sudah membebani *tax payer money*.

√ Adanya sikap berhati-hati yang berlebihan dari bank-bank yang *viable* dalam menyalurkan kredit membuat kondisi *credit crunch* masih membayangi perekonomian Indonesia khususnya di tahun 1999 ini. Sikap berhati-hati yang berlebihan ini selain berasal dari resiko bisnis yang masih tinggi sehingga bank harus meningkatkan *risk premium*-nya, juga disebabkan adanya ketentuan pembentukan pencadangan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis atas setiap Rupiah yang disalurkan sebagai kredit.

√ Banyak masalah yang bersifat teknis dalam implementasi rekapitalisasi perbankan, yang membutuhkan penanganan yang hati-hati dan cermat antara lain :

1. Proses pengalihan maupun penjualan *bad asset* ke AMU, yang dalam banyak hal aset tersebut dalam kondisi : - file kredit yang tidak lengkap, berbelit-belit ataupun cacat hukum - appraisal yang tidak mudah - merupakan kredit kepada group, yang pada akhirnya membutuhkan *legal cost* yang tidak murah.
2. Dalam pelaksanaan rekapitalisasi perlu adanya seleksi terhadap bankir maupun pemilik bank yang nakal, yang tidak diinginkan untuk tetap berperan dalam bisnis perbankan, tetapi dilain pihak mereka dalam banyak hal banyak mengetahui sejarah mengenai seluk beluk aset bermasalah yang ada.
3. Penetapan kriteria terhadap masuknya asing dalam industri perbankan, yang meliputi asing yang mana yang boleh masuk (bank/non bank, dari negara mana) dan sampai sejauh mana operasi bank asing tersebut diperbolehkan, apakah masih perlu adanya pembatasan segmen pasar ataupun wilayah kerja dan lain sebagainya. Pada masa awal kemungkinan banyak diwarnai oleh benturan-benturan antar praktisi perbankan, birokrat/pemerintah, Bank Indonesia maupun dengan DPR yang dalam banyak hal berada diseputar terusiknya rasa nasionalisme yang ada.

Sementara itu, dalam semester I tahun 1999, diperkirakan dunia perbankan Indonesia akan menghadapi puncak kesibukan dalam melaksanakan perhelatan besar, mengingat banyaknya agenda yang harus dikerjakan pada masa-masa tersebut, antara lain:

√ Pelaksanaan rekapitalisasi bagi bank-bank yang *eligible* dan diikuti dengan pemindahan sekian banyak "*bad aset*" yang nilainya tidak sedikit dan lokasinya tersebar diseluruh Indonesia ke AMU/BPPN.

√ Penutupan sejumlah bank yang tidak mampu ikut program rekapitalisasi, yang biasanya diwarnai dengan ramainya upaya :

1. Pengalihan dan pembayaran dana deposan BBO ke Bank Pembayar (yang biasanya Bank Pesero).
2. Pembayaran tagihan<sup>2</sup> lain BBO (antar bank ataupun kreditur lainnya) yang biasanya memerlukan verifikasi yang seksama.

3. Pengamanan aset yang tersebar di seluruh cabang BBO oleh "Tim" yang ditunjuk, sebelum aset tersebut dijual oleh yang berwenang (bisa oleh BPPN ataupun BI).
4. Penyelesaian karyawan BBO, yang biasanya banyak diwarnai dengan tuntutan ataupun unjuk rasa dari karyawan tersebut.

√ Berlangsungnya proses merger Bank Mandiri (mulai Mei 1999), yang permasalahannya juga sangat *complicated* antara lain :

- Sebagaimana besar karyawannya bank yang akan dimerger (member banks) sejak akhir th.1998 telah *de-motivated* dan *hoopless* dengan adanya rencana PHK. Penyelesaian PHK atas ribuan karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia juga bukan merupakan perkara yang mudah dan murah. Bilamana penyelesaiannya kurang hati-hati dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak sosial yang biaya untuk meredamnya biasanya jauh lebih mahal lagi.
- Perasaan *demotivated* karyawan tersebut diatas dapat mengarah kepada tindakan "penggembosan" atas aset-aset bank yang masih baik, yang rencananya dialihkan kepada Bank Hasil Merger (Bank Mandiri). Apabila hal ini terjadi, maka Bank Mandiri akan membutuhkan "dana talangan" yang lebih besar dari Pemerintah atas limpahan *liabilities* yang tidak seimbang dengan besarnya limpahan *good aset* dari *members bank* yang ada.

Kesemua agenda tersebut diatas haruslah merupakan konsep yang cukup kredibel dan jelas arahnya serta dapat dikomunikasikan kepada masyarakat secara sistimatis dan hati-hati, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap masih dirasakan labil.

Dengan membaca tulisan sdr. Halim Alamsyah serta komentar yang diuraikan diatas, tidaklah berlebihan bilamana ada perasaan pesimisme yang membayangi upaya restrukturisasi perbankan tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada beban terhadap *tax payer money* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang telah dianggarkan. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif terhadap sektor moneter maupun fiskal dan putaran selanjutnya sangat mudahlah ditebak, yaitu kepulihan kegiatan sektor riel akan menjadi terhambat.

Akhirnya komentar ini kami tutup dengan harapan semoga apa yang kami tulis ini tidaklah seluruhnya benar dan banyak diwarnai oleh subyektivitas, mengingat masih banyak aspek-aspek lain yang mungkin mempunyai dampak kondusif, misalnya kondisi makro (intern/ekstern), sosial/politik ternyata cepat membaik dan disertai oleh dinamika yang ada dan perasaan yang kuat dari pelaku/praktisi ekonomi/perbankan untuk secepatnya keluar dari krisis, yang kesemuanya akan dapat merubah kondisi menjadi lebih baik. Semoga.